



KEMENTERIAN

BU
MN

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 041 TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

KEMENTERIAN BUMN



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian BUMN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian BUMN. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 28 April 2022
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	5
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	6
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	8
III. NERACA.....	9
IV. LAPORAN OPERASIONAL	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
A. PENJELASAN UMUM	12
1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN	12
2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	14
3. BASIS AKUNTANSI	14
4. DASAR PENGUKURAN	15
5. KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	21
1. PENDAPATAN	21
2. BELANJA.....	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	28
1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	28
2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	28
3. Piutang Bukan Pajak.....	28
4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	30
5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.....	31
6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	31
7. Persediaan	31
8. Tanah	31
9. Peralatan dan Mesin	32
10. Gedung dan Bangunan.....	34
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan	34
12. Aset Tetap Lainnya	35
13. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	35
14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	35
15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	36
16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	36

17. Aset Tak Berwujud	36
18. Aset Lain-lain	40
19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	41
20. Utang Kepada Pihak Ketiga	42
21. Hibah Yang Belum Disahkan	42
22. Pendapatan Diterima Dimuka	43
23. Ekuitas	43
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	44
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	44
2. Beban Pegawai	45
3. Beban Persediaan	46
4. Beban Barang dan Jasa	46
5. Beban Pemeliharaan	49
6. Beban Perjalanan Dinas	50
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	51
9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	51
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	53
1. Ekuitas Awal	53
2. Surplus (Defisit) LO	53
3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	53
4. Transaksi Antar Entitas	53
5. Ekuitas Akhir	53
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	54
1. Data Tuntutan Hukum	54
2. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara	55
3. Dampak Pandemi Covid-19	56
4. Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan	57
5. Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan	58



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian BUMN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.158.659.573 atau mencapai 317,29% dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp1.941.017.000.

Realisasi Belanja Negara untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp190.942.482.059 atau mencapai 98,91% dari alokasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp193.047.600.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.970.643.692.032 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.964.024.494, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.962.218.883.741, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto) masing-masing sebesar Rp28.099.544 dan Rp3.432.684.253.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.389.536.679 dan Rp1.961.254.155.353.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.029.767.545, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp205.130.261.143 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(201.100.493.598).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.054.747.817) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(202.155.241.415).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.961.869.742.868, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(202.155.241.415), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp(42.127.019) dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp201.581.780.919, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.961.254.155.353.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
 (DALAM RUPIAH)

No	URAIAN	CATT.	2021				2020			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
A.1	PENERIMAAN NEGARA	B.1.	1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29	0	8.337.874.123	8.337.874.123	100,00
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29	0	8.337.874.123	8.337.874.123	100,00
A.1.2	HIBAH		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1.1 + A.1.2)		1.941.017.000	6.158.659.573	4.217.642.573	317,29	0	8.337.874.123	8.337.874.123	100,00
B	BELANJA NEGARA									
B.1.1	Rupiah Murni	B.2.	193.047.600.000	190.942.482.059	(2.105.117.941)	98,91	266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65
B.1.1.a	Belanja Pegawai	B.3.	58.140.767.000	57.808.669.747	(332.097.253)	99,43	58.085.663.000	57.640.218.705	(445.444.295)	99,23
B.1.1.b	Belanja Barang	B.4.	124.138.219.000	122.437.963.609	(1.700.255.391)	98,63	102.977.435.000	97.614.016.856	(5.363.418.144)	94,79
B.1.1.c	Belanja Modal	B.5.	10.768.614.000	10.695.848.703	(72.765.297)	99,32	105.329.453.000	104.876.308.432	(453.144.568)	99,57
	JUMLAH BELANJA (B.1.1)		193.047.600.000	190.942.482.059	(2.105.117.941)	98,91	266.392.551.000	260.130.543.993	(6.262.007.007)	97,65



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

III. NERACA

NERACA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catt.	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	3.824.293.582	2.782.486.208	1.041.807.374	37,44
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	0	32.017.185	(32.017.185)	(100,00)
Piutang Bukan Pajak	C.3	159.266.898	344.307.437	(185.040.539)	(53,74)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	(81.177.088)	(41.709.952)	(39.467.136)	94,62
Piutang Bukan Pajak (Netto)		78.089.810	302.597.485	(224.507.675)	(74,19)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.5	3.500.000	3.500.000	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.6	(17.500)	(17.500)	0	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		3.482.500	3.482.500	0	0,00
Persediaan	C.7	1.058.158.602	1.175.459.227	(117.300.625)	(9,98)
JUMLAH ASET LANCAR		4.964.024.494	4.296.042.605	667.981.889	15,55
ASET TETAP					
Tanah	C.8	1.468.058.953.000	1.468.058.953.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.9	137.776.726.404	107.900.878.431	29.875.847.973	27,69
Gedung dan Bangunan	C.10	468.773.597.003	400.689.725.717	68.083.871.286	16,99
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	7.706.388.680	7.706.388.680	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.12	1.066.410.162	1.066.410.162	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	0	68.862.035.362	(68.862.035.362)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan	C.14	(121.163.191.508)	(93.700.217.593)	(27.462.973.915)	29,31
JUMLAH ASET TETAP		1.962.218.883.741	1.960.584.173.759	1.634.709.982	0,08
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	28.240.748	28.240.748	0	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	(141.204)	(141.204)	0	0,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		28.099.544	28.099.544	0	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		28.099.544	28.099.544	0	0,00
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.17	19.389.526.163	23.281.538.648	-3.892.012.485	(16,72)
Aset Lain-lain	C.18	3.892.012.485	50.942.645.557	(47.050.633.072)	(92,36)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(19.848.854.395)	(67.646.810.616)	47.797.956.221	(70,66)
JUMLAH ASET LAINNYA		3.432.684.253	6.577.373.589	(3.144.689.336)	(47,81)
JUMLAH ASET		1.970.643.692.032	1.971.485.689.497	(841.997.465)	(0,04)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	78.578.543	2.468.333.417	(2.389.754.874)	(96,82)
Hibah Yang Belum Disahkan	C.21	1.311.700.000	0	1.311.700.000	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.22	7.999.258.136	7.147.613.212	851.644.924	11,92
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		9.389.536.679	9.615.946.629	(226.409.950)	(2,35)
JUMLAH KEWAJIBAN		9.389.536.679	9.615.946.629	(226.409.950)	(2,35)
EKUITAS					
Ekuitas	C.23	1.961.254.155.353	1.961.869.742.868	(615.587.515)	(0,03)
JUMLAH EKUITAS		1.961.254.155.353	1.961.869.742.868	(615.587.515)	(0,03)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.970.643.692.032	1.971.485.689.497	(841.997.465)	(0,04)



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

IV. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATT	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	4.029.767.545	4.095.990.478	(66.222.933)	(1,62)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		4.029.767.545	4.095.990.478	(66.222.933)	(1,62)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		4.029.767.545	4.095.990.478	(66.222.933)	(1,62)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	57.803.877.109	57.684.364.855	119.512.254	0,21
Beban Persediaan	D.3	2.053.627.628	2.302.075.427	(248.447.799)	(10,79)
Beban Barang dan Jasa	D.4	95.416.246.129	70.751.947.107	24.664.299.022	34,86
Beban Pemeliharaan	D.5	9.248.897.218	8.438.185.133	810.712.085	9,61
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11.970.296.074	17.402.379.216	(5.432.083.142)	(31,21)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	28.597.849.849	23.359.614.648	5.238.235.201	22,42
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	39.467.136	(66.509.480)	105.976.616	(159,34)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		205.130.261.143	179.872.056.906	25.258.204.237	14,04
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(201.100.493.598)	(175.776.066.428)	(25.324.427.170)	14,41
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.030.000.000	0	1.030.000.000	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.107.049.209	0	2.107.049.209	100,00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(1.077.049.209)	0	(1.077.049.209)	(100,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.301.392	64.612.222	(42.310.830)	(65,48)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	421.619.193	(421.619.193)	(100,00)
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.301.392	(357.006.971)	379.308.363	(106,25)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	(1.054.747.817)	(357.006.971)	(697.740.846)	195,44
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		(202.155.241.415)	(176.133.073.399)	(26.022.168.016)	14,77



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ERICK THOHIR

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATT.	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
EKUITAS AWAL	E.1	1.961.869.742.868	1.860.229.141.715	101.640.601.153	5,46
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(202.155.241.415)	(176.133.073.399)	(26.022.168.016)	14,77
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(42.127.019)	493.278.682	(535.405.701)	(108,54)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0	0	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0	0	0	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	7.285.807	521.561.602	(514.275.795)	(98,60)
LAIN-LAIN	E.3.5	(49.412.826)	(28.282.920)	(21.129.906)	74,71
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	201.581.780.919	277.280.395.870	(75.698.614.951)	(27,30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(615.587.515)	101.640.601.153	(102.256.188.668)	(100,61)
EKUITAS AKHIR	E.5	1.961.254.155.353	1.961.869.742.868	(615.587.515)	(0,03)

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA****ERICK THOHIR**

A. PENJELASAN UMUM

1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/badan usaha milik negara. Kementerian BUMN bertransformasi dari unit eselon II di Kementerian Keuangan (1973-1993) menjadi unit eselon I di Kementerian Keuangan (1993-1998) lalu menjadi Kementerian BUMN pada tahun 1998. Kementerian BUMN berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110.

Sejalan dengan pembentukan kabinet pada tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dan perubahannya. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara;
- 3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 4) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 5) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Menteri I dijabat oleh Sdr. Pahala Nugraha Mansury;
- b. Wakil Menteri II dijabat oleh Sdr. Kartika Wirjoatmodjo;
- c. Sekretariat Kementerian dijabat oleh Sdr. Susyanto;
- d. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dijabat oleh Sdr. Carlo B. Tewu;
- e. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi dijabat oleh Sdr. Tedi Bharata;

- f. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Sdri. Nawal Nely;
- g. Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Strategis dijabat oleh Sdr. Warih Sadono;
- h. Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Sdri. Loto Srinaita Ginting;
- i. Staf Ahli Bidang Industri dijabat oleh Sdr. Rabin Indrajad Hattari.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019, Menteri BUMN telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 31 Maret 2020. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang badan usaha milik negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 terdiri dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian BUMN. Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan pembinaan BUMN, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan hingga target kinerja yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan, serta pencapaian pembangunan Indonesia, maka tema yang diangkat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN 2020-2024 ini adalah "Menciptakan Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan makmur."

Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 adalah tahapan yang krusial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena periode ini merupakan fase terakhir yang akan menentukan pencapaian target pembangunan. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian BUMN Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Melalui Renstra Kementerian BUMN

2020-2024, diharapkan BUMN akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bangsa. Diharapkan Renstra Kementerian BUMN tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka mewujudkan BUMN sebagai Agen Pencipta Nilai maupun Agen Pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMAK-BMN digunakan untuk mencatat dan mengorganisasi barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Selain mengelola DIPA BA 041, Kementerian BUMN juga mendapatkan DIPA BA 999.03 (Investasi Pemerintah) dan DIPA BA 999.07 (Belanja Subsidi) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini.

3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian BUMN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian BUMN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian BUMN yaitu Pendapatan Sewa Gedung yang diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Berdasarkan PMK No. 69/PMK.06/2014, penyisihan piutang tak tertagih didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D dan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Termasuk didalamnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp228.591.256.000. Sepanjang Tahun Anggaran 2021, Kementerian BUMN telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi dari DIPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodasi antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja, optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja, serta penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Perubahan pagu anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	63.174.744.000	58.140.767.000
Belanja Barang	143.104.167.000	124.138.219.000
Belanja Modal	22.312.345.000	10.768.614.000
Jumlah Belanja	228.591.256.000	193.047.600.000

Sedangkan apabila dilihat dari program kegiatan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	31 Desember 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	153.931.844.000	135.684.639.000
Program Pembinaan BUMN	74.659.412.000	57.362.961.000
Total Belanja	228.591.256.000	193.047.600.000

Perubahan nilai DIPA tersebut di atas berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga, Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV.

Kementerian BUMN tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp6.158.659.573. Rincian Realisasi Pendapatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021		% Realisasi
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.941.017.000	4.920.372.188	253,49
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	73.995.451	(100,00)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17.458.399	(100,00)
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84.431.435	(100,00)
5	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	30.000.000	(100,00)
6	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2.100	(100,00)
7	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2.400.000	(100,00)
8	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.030.000.000	(100,00)
Total		1.941.017.000	6.158.659.573	317,29

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 secara total mengalami penurunan sebesar 26,14% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya akun yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Akun tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan adanya beberapa *tenant* yang telah melakukan pembayaran secara sekaligus atas sewa ruangan jangka panjang, antara 2 sampai dengan 5 tahun pada periode sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
		31/12/2021	31/12/2020		
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.920.372.188	8.158.124.225	(3.237.752.037)	(39,69)
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	73.995.451	113.583.237	(39.587.786)	(34,85)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.458.399	17.265.240	193.159	1,12
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	84.431.435	44.654.182	39.777.253	89,08
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	3.676.000	(3.676.000)	(100,00)
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	571.239	(571.239)	(100,00)
7	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	30.000.000	0	30.000.000	100,00
8	Pendapatan Jasa Lainnya	2.100	0	2.100	100,00
9	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.400.000	0	2.400.000	100,00
10	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.030.000.000	0	1.030.000.000	100,00
Total		6.158.659.573	8.337.874.123	(2.179.214.550)	(26,14)

Keterangan:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp4.920.372.188 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa Ruang, Listrik dan Air dari *tenant* yang menyewa gedung dan bangunan Kementerian BUMN dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

<i>Tenant</i>	Pembayaran Ruang	Pembayaran Air	Pembayaran Listrik	Total
Koperasi Prabunara	0	1.734.416	26.680.375	28.414.791
Koperasi Prabunara (GS8)	548.055.000	21.247.218	0	569.302.218
PT BNI, Tbk	3.830.856.000	1.146.098	75.943.392	3.907.945.490
PT BRI, Tbk	66.528.000	305.657	54.403.597	121.237.254
PT Pos Indonesia	0	0	9.487.301	9.487.301
PT Telkomsel	0	0	20.859.228	20.859.228
PT XL Axiata	0	0	15.972.293	15.972.293
PT Bank Mandiri, Tbk	12.808.296	0	12.792.845	25.601.141
PT Nitraya Bimasakti	176.349.000	6.407.332	29.117.728	211.874.060
PT BTN, Tbk	0	0	5.942.694	5.942.694
PT Danareksa	0	0	484.144	484.144
PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	0	3.251.574	3.251.574
Total	4.634.596.296	30.840.721	254.935.171	4.920.372.188

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp73.995.451 terdiri atas:

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembelian *Notebook* atas nama CV Sumber Abadi sebesar Rp5.760.679;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi atas nama PT Wika Pracetak Gedung sebesar Rp20.985.511;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan *computer supplies* atas nama CV Raka Kencana sebesar Rp3.778.187;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan langganan aplikasi *Integrated Talent Management System* (ITMS) atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., sebesar Rp74.250;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa housekeeping, keamanan, dan pengemudi atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp5.246.230;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan *security paper* atas nama Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp3.499.800;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sewa mesin foto copy atas nama PT Delta Sinkron Lestari sebesar Rp2.279.200;
- Denda keterlambatan pembayaran sewa ruangan atas nama PT BNI (Persero) sebesar Rp25.178.420;
- Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *waterproofing* atap gedung atas nama PT Intra Maju Indonesia sebesar Rp725.300;
- Pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran sewa ruangan periode tahun 2020-2021 an PT Pos Indonesia sebesar Rp1.699.920;
- Pembayaran denda keterlambatan pembayaran listrik periode November 2021 an PT BRI sebesar Rp74.902;

- Pembayaran denda keterlambatan pembayaran listrik periode November 2021 an PT Dhost Telekomunikasi Nusantara Rp33.293;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan fire stop atas nama PT Niaga Artha Chemcons sebesar Rp1.782.867;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan jasa pembenahan arsip termin kedua atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp2.596.320;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan instalasi hydrant taman belakang atas nama PT Atrindo Prima Persada sebesar Rp280.572.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp17.458.007 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja pegawai yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu.
 4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp84.431.435 merupakan penyetoran kembali kelebihan pembayaran belanja barang yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu antara lain berupa pengembalian honorarium narasumber, PPNPN, dan perjalanan dinas dalam negeri.
 5. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp30.000.000 merupakan penyetoran atas hasil penjualan pemusnahan arsip Kementerian BUMN.
 6. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp2.100 merupakan potongan pembulatan SPM.
 7. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp2.400.000 merupakan penyetoran Kembali uang muka gaji.
 8. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.030.000.000 merupakan penyetoran hasil lelang Barang Milik Negara yang telah dihapus.

2. BELANJA

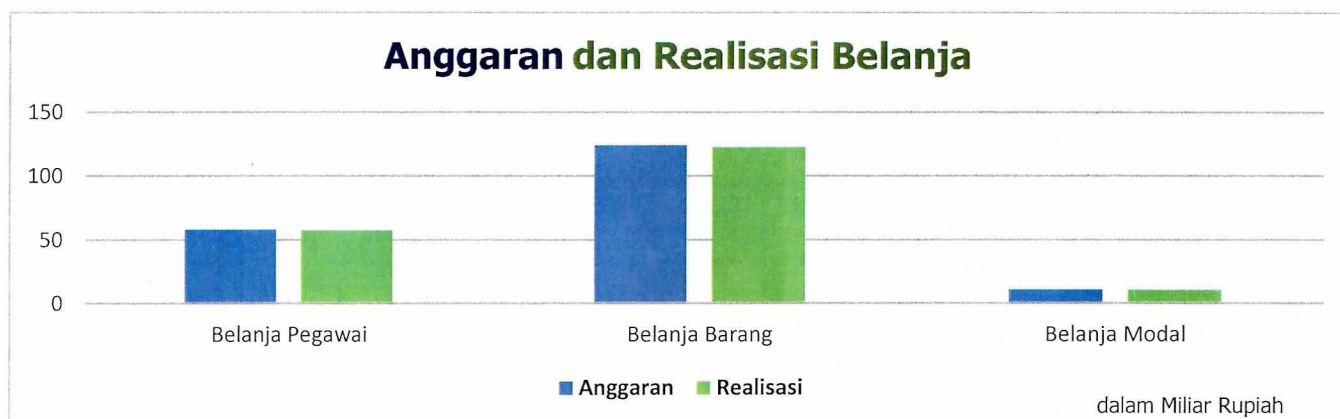
Realisasi Belanja Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp190.942.482.059 atau 98,91% dari anggaran belanja sebesar Rp193.047.600.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja	Per 31 Desember 2021		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	58.140.767.000	57.837.553.513	99,48
2	Belanja Barang	124.138.219.000	122.523.783.187	98,70
3	Belanja Modal	10.768.614.000	10.695.848.703	99,32
	Total Belanja Kotor	193.047.600.000	191.057.185.403	98,97
	Pengembalian Belanja		(114.703.344)	
	Jumlah	193.047.600.000	190.942.482.059	98,91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Program	Per 31 Desember 2021		
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	135.684.639.000	133.977.210.369	98,74
2	Program Pembinaan BUMN	57.362.961.000	56.965.271.690	99,31
Jumlah		193.047.600.000	190.942.482.059	98,91

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp57.808.669.747 dan Rp57.640.218.705. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,29% dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Kenaikan ini disebabkan adanya pembayaran kenaikan gaji berkala kepada pegawai, pembayaran gaji pegawai yang telah Alih Status PNS, serta pembayaran penambahan tunjangan bagi pegawai yang telah menikah dan memiliki anak.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.678.895.468	24.436.296.746	242.598.722	0,99
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.672.665.832	1.399.266.506	273.399.326	19,54
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	31.485.992.213	31.915.123.158	(429.130.945)	(1,34)
	Jumlah Belanja Kotor	57.837.553.513	57.750.686.410	86.867.103	0,15
	Pengembalian Belanja Pegawai	(28.883.766)	(110.467.705)	(81.583.939)	
	Total	57.808.669.747	57.640.218.705	168.451.042	0,29

b) Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp122.437.963.609 dan Rp97.614.016.856. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 25,43% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya peningkatan kegiatan antara lain penambahan jumlah unit sewa mobil operasional dan pembayaran biaya rawat jalan bagi pegawai terkonfirmasi positif Covid-19.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Barang Operasional	15.006.174.891	10.561.208.260	4.444.966.631	42,09
2	Belanja Barang Non Operasional	11.215.887.574	13.038.807.435	(1.822.919.861)	(13,98)
3	Belanja Barang Persediaan	2.187.743.011	2.188.369.286	(626.275)	(0,03)
4	Belanja Jasa	69.409.270.169	44.138.620.462	25.270.649.707	57,25
5	Belanja Pemeliharaan	9.063.199.324	8.907.986.642	155.212.682	1,74
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.413.875.818	16.232.045.186	(4.818.169.368)	(29,68)
7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	745.431.084	591.240.263	154.190.821	26,08
8	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	609.764.520	430.402.427	179.362.093	41,67
9	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	32.297.400	(32.297.400)	(100,00)
10	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.872.436.796	1.086.432.690	1.786.004.106	164,39
11	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	541.280.570	(541.280.570)	(100,00)
	Jumlah Belanja Kotor	122.523.783.187	97.748.690.621	24.775.092.566	25,35
	Pengembalian Belanja Barang	(85.819.578)	(134.673.765)	48.854.187	
	Total	122.437.963.609	97.614.016.856	24.823.946.753	25,43

Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp3.482.201.316 atau 90,92% dari anggaran sebesar Rp3.829.951.000 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	642.328.000	609.764.520	94,93
2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.187.623.000	2.872.436.796	90,11
	Jumlah Belanja Kotor	3.829.951.000	3.482.201.316	90,92
	Pengembalian Belanja		0	
	Total	3.829.951.000	3.482.201.316	90,92

Realisasi belanja barang penanganan pandemi Covid-19 meliputi biaya uji swab PCR bagi pegawai Kementerian BUMN serta biaya rawat jalan bagi pegawai terkonfirmasi positif.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.695.848.703 dan Rp104.876.308.432. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 89,80% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 yang disebabkan adanya penurunan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Anggaran Modal Tahun Anggaran 2020 yang sejalan dengan kebijakan pengendalian belanja Pemerintah. Selain itu, terdapat pekerjaan yang bernilai besar pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya Renovasi Ruang Kerja dan MEP Gedung Kementerian BUMN dan Pembelian *Access Point* dan *Switch Access* untuk *Upgrade Perangkat Jaringan* Kementerian BUMN.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% Naik/Turun Antar Tahun
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.765.420.427	19.117.058.496	(9.351.638.069)	(48,92)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	864.428.276	85.759.249.936	(84.894.821.660)	(98,99)
3	Belanja Modal Lainnya	66.000.000	0	66.000.000	100,00
	Jumlah Belanja Kotor	10.695.848.703	104.876.308.432	(94.180.459.729)	(89,80)
	Pengembalian Belanja Modal	0	0	0	
	Total	10.695.848.703	104.876.308.432	(94.180.459.729)	(89,80)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)**

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing adalah sebesar Rp3.824.293.582 dan Rp2.782.486.208 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Belanja Dibayar Dimuka			
No	Jenis	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Pembayaran Voucher BBM	5.250.000	14.050.000
2	Pembayaran Biaya <i>License</i> dan <i>Antivirus</i>	2.779.700.249	1.999.984.225
3	Pembayaran Biaya <i>Warranty</i>	88.385.000	91.499.999
4	Pembayaran Program Beasiswa S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN	950.958.333	0
	Total Belanja Barang Dibayar Dimuka	3.824.293.582	2.105.534.224
1	Pekerjaan Renovasi Gedung Kementerian BUMN yang Tidak Selesai 100% per 31 Desember 2020	0	676.951.984
	Total Belanja Modal Dibayar Dimuka	0	676.951.984
	Total	3.824.293.582	2.782.486.208

Telah dilakukan serah terima pekerjaan senilai Rp676.951.984 antara Kementerian BUMN dengan penyedia barang/jasa atas Pekerjaan Renovasi Gedung Kementerian BUMN sebagaimana dituangkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor BAST-02/PPK3.MBU/2021 tanggal 31 Januari 2021, sehingga pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai.

2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp32.017.185. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya sampai dengan tanggal periode pelaporan. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dikarenakan seluruh Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.017.185 berupa kelebihan pembayaran honorarium dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas telah disetorkan ke rekening kas negara Per 31 Desember 2021.

3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp159.266.898 dan Rp344.307.437. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang bukan pajak sebesar Rp159.266.898 terdiri atas:

1. Tagihan sewa ruangan Gedung Kementerian BUMN sebesar Rp23.415.331;

2. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Konsultasi Pengawas Renovasi Ruang Kerja Kementerian BUMN Tahun 2017 a.n. PT Artefak Arkindo sebesar Rp80.784.677;
3. Sisa kelebihan pembayaran PPN ke Kas Negara atas pekerjaan pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi a.n. PT Provinces Indonesia sebesar Rp41.678.902;
4. Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan untuk 3 orang pegawai a.n. T.N. dkk. sebesar Rp1.060.000;
5. Kelebihan pembayaran Gaji Induk a.n. B.D.P sebesar Rp5.416.400;
6. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja atas pengenaan hukuman disiplin untuk 5 orang pegawai a.n. M.M. dkk. sebesar Rp6.911.588.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp185.040.539 dibandingkan dengan Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020		344.307.437
Penambahan		15.003.753
- Mutasi tambah atas piutang sewa ruangan gedung Kementerian BUMN oleh Teenant	1.615.765	
- Pengembalian kelebihan Gaji a.n. T.N. dkk/3 Orang	1.060.000	
- Pengembalian kelebihan Gaji Induk a.n. B.D.P.	5.416.400	
- Pengembalian tunjangan kinerja atas pengenaan Hukuman Disiplin a.n. M.M. dkk./5 orang	6.911.588	
Pengurangan		200.044.292
- Mutasi kurang atas pelunasan piutang sewa ruangan gedung Kementerian BUMN oleh Tenant	145.273.115	
- Pelunasan Kelebihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada PT Wika Realty	30.113.250	
- Pelunasan Kelebihan pembayaran Gaji Pokok a.n. W.S.	5.392.857	
- Pelunasan Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. M.I.	4.331.250	
- Koreksi nilai piutang Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan a.n. C.B.T. sesuai dengan surat Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Nomor ND-494/S.MBU.A/07/2021 tanggal 9 Juli 2021	5.500.000	
- Pelunasan Pengembalian kelebihan Gaji a.n. M.N.	1.775.000	
- Pelunasan Pengembalian Gaji a.n. P.S.H.	5.958.900	
- Pelunasan Denda Keterlambatan Pembayaran Sewa Ruangan Tahun 2020 a.n. PT Pos Indonesia	1.699.920	
Jumlah Pengurangan		(185.040.539)
Mutasi Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021		(185.040.539)
Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021		159.266.898

Termasuk dalam nilai Piutang Bukan Pajak tersebut di atas adalah piutang atas tagihan sewa ruangan gedung Kementerian BUMN. Besaran sewa ruangan ditetapkan oleh Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan. Apabila sewa terjadi sebelum adanya penetapan dari Pengelola Barang, maka Kuasa Pengguna Barang Kementerian BUMN dapat menetapkan nilai besaran sewa berdasarkan hasil revidi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian BUMN yaitu Inspektorat. Selanjutnya terhadap besaran sewa yang ditetapkan di atas melebihi dari nilai penetapan dari Pengelola Barang, maka tidak dapat diperhitungkan sebagai pengembalian sewa dalam hal sudah dilakukan pembayaran atau penyetoran ke kas negara.

Dengan adanya adendum kontrak sewa ruangan, *tenant* wajib membayar denda atas keterlambatan pembayaran beban listrik dan air. Oleh karena itu, piutang sewa ruangan ditambah dengan piutang atas listrik dan air per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Piutang 31 Desember 2021			Total
		Ruangan	Listrik	Air	
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	0	1.086.632	0	1.086.632
2	PT BRI (Persero), Tbk	0	3.376.211	108.661	3.484.872
3	PT Telekomunikasi Seluler	0	2.889.872	0	2.889.872
4	PT BNI (Persero), Tbk	0	5.634.129	75.929	5.710.058
5	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	0	1.745.371	0	1.745.371
6	PT Pos Indonesia	0	782.729	0	782.729
7	PT Nitraya Bimasakti	0	2.458.660	799.361	3.258.021
8	PT BTN (ATM)	0	447.274	0	447.274
9	Koperasi Prabunara (48)	0	0	1.920.811	1.920.811
10	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	0	1.931.410	158.281	2.089.691
	Jumlah	0	20.352.288	3.063.043	23.415.331

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp(81.177.088) dan Rp(41.709.952) yang merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

No	Debitur	Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	1.086.632	0,50%	5.433	Lancar
2	PT BRI (Persero), Tbk	3.484.872	0,50%	17.424	Lancar
3	PT Telekomunikasi Seluler	2.889.872	0,50%	14.449	Lancar
4	PT BNI (Persero), Tbk	5.710.058	0,50%	28.550	Lancar
5	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	1.745.371	0,50%	8.727	Lancar
6	PT Pos Indonesia	782.729	0,50%	3.914	Lancar
7	PT Nitraya Bimasakti	3.258.021	0,50%	16.290	Lancar
8	PT BTN (ATM)	447.274	0,50%	2.236	Lancar
9	Koperasi Prabunara (48)	1.920.811	0,50%	9.604	Lancar
10	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	2.089.691	0,50%	10.448	Lancar
11	PT Artefak Arkindo	80.784.677	100,00%	80.784.677	Macet
12	PT Provinces Indonesia	41.678.902	0,50%	208.395	Lancar
13	Pegawai Kementerian BUMN	13.387.988	0,50%	66.940	Lancar
	Jumlah	159.266.898		81.177.088	

Terhadap debitur PT Artefak Arkindo, telah disampaikan surat penagihan piutang yang ketiga sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-18/S.MBU.C/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 sehingga kualitas piutangnya diturunkan menjadi macet. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan pengalihan pengurusan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I melalui Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Nomor S-93/S.MBU.C/09/2021 tanggal 2 September 2021 Hal Penyerahan Pengurusan Piutang PT Artefak Arkindo.

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Kementerian BUMN per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.500.000 dan Rp3.500.004. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa tuntutan ganti rugi kedalam aset lancar disebabkan adanya tuntutan ganti rugi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun berikutnya. Bagian lancar tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi yang akan jatuh tempo satu tahun berikutnya atas kehilangan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ a.n. DNZ yang sudah ditetapkan nilai penggantian sebesar Rp70.000.000 dengan cicilan sebesar Rp291.667 per bulan selama 20 tahun dengan pembayaran cicilan pertama ditetapkan pada bulan November 2011.

6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp17.500 dan Rp17.500 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan	Kualitas
DNZ	3.500.000	0,50%	17.500	Lancar

7. Persediaan

Persediaan merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan digunakan untuk dikonsumsi/diserahkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.058.158.602 dan Rp1.175.459.227. Nilai per tanggal 31 Desember 2021 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	1.005.148.606	1.040.350.627
2	Bahan untuk Pemeliharaan	21.357.600	135.108.600
3	Suku Cadang	16.214.182	0
4	Persediaan Lainnya	15.438.214	0
Jumlah		1.058.158.602	1.175.459.227

8. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13. Sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 1, Tanah Kementerian BUMN seluruhnya seluas 17.776 M². Pada tanggal 11 Agustus 2015, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Badan Pertanahan Nasional telah

menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 116/Gambir/2015 yang diterbitkan oleh berdasarkan Surat Ukur Nomor 00013/Gambir/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Nilai Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.468.058.953.000 dan Rp1.468.058.953.000. Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset Tanah sampai dengan 31 Desember 2021.

Nilai Tanah per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp1.468.058.953.000 termasuk Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara (eks. PT Varuna Tirta Prakasya) yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian BUMN berdasarkan KMK Republik Indonesia Nomor 142/KM.6/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Penetapan status penggunaan tersebut ditindaklanjuti dengan serah terima antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam BAST Nomor B-631.A/K.4/KPA.5/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil estimasi penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, nilai Tanah atas Barang Rampasan Negara tersebut sebesar Rp19.869.146.000.

Sesuai hasil klarifikasi dan verifikasi data Barang Milik Negara berupa tanah pada Kementerian BUMN oleh Direktorat Barang Milik Negara pada tanggal 21 Oktober 2020 maka sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor BA-VER-0411X/2020 terdapat jumlah tanah sebanyak 5 (lima) bidang, yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah bersertipikat hak pakai dan 4 (empat) bidang tanah bersertipikat hak guna bangunan. 4 (empat) bidang tanah yang bersertipikat hak guna bangunan tersebut telah atas nama PT Varuna Tirta Prakasya dan akan berakhir hak guna bangunannya pada tanggal 2 Maret 2012. Informasi yang diterima, bahwa perpanjangan hak guna bangunan tersebut akan dilakukan oleh PT Varuna Tirta Prakasya setelah aset tersebut ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

Pada tanggal 14 Januari 2021, PT Varuna Tirta Prakasya telah mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara *Non-Cash* kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: A.044/PL.303/A.I atas Tanah yang berasal dari Barang Rampasan Negara sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, permohonan tersebut diusulkan sebagai Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-132/MBU/02/2021 tanggal 24 Februari 2021. Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kementerian BUMN Melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-158/MK.6/2022 tanggal 22 April 2022.

9. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp137.776.726.404 dan Rp107.900.878.431 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Peralatan dan Mesin	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Alat Besar	17.840.098.171	17.840.098.171	0	0,00
2	Alat Angkutan	7.913.183.700	6.290.291.200	1.622.892.500	25,80
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.911.762.837	2.911.762.837	0	0,00
4	Alat Pengolahan	11.644.050	11.644.050	0	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.399.306.991	31.147.997.809	16.251.309.182	52,17
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.111.129.349	3.553.203.619	1.557.925.730	43,85
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	177.693.802	156.494.800	21.199.002	13,55
8	Alat Laboratorium	6.089.616.502	6.070.346.702	19.269.800	0,32
9	Alat Persenjataaan	29.920.000	29.920.000	0	0,00
10	Komputer	49.878.952.723	39.612.120.940	10.266.831.783	25,92
11	Alat Keselamatan Kerja	199.796.453	199.796.453	0	0,00
12	Peralatan Proses/Produksi	2.159.850	2.159.850	0	0,00
13	Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat	75.042.000	75.042.000	0	0,00
14	Peralatan Olahraga	136.419.976	0	136.419.976	100,00
Nilai Peralatan dan Mesin		137.776.726.404	107.900.878.431	29.875.847.973	27,69
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(83.715.709.822)	(100.730.167.953)	17.014.458.131	(16,89)
Nilai Buku Peralatan dan Mesin		54.061.016.582	7.170.710.478	46.890.306.104	653,91

Pada tahun 2021, Kementerian BUMN menerima 2 (dua) Hibah Langsung berupa Barang yaitu:

- 1 (Satu) unit kendaraan *Outlander PHEV* senilai Rp1.311.700.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 041/MMKSI-BA/2021. Saat ini, hibah tersebut sedang dalam proses pengajuan Nomor Register Hibah kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengesahan hibah dimaksud.
- 1 (Satu) unit Ambulans beserta kelengkapannya senilai Rp272.000.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-2/DIR/2021 dan BA-2/S.MBU/11/2021 tanggal 17 November 2021. Hibah tersebut telah memperoleh Nomor Register Hibah dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI.

Rincian kenaikan/penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2020	107.900.878.431
Mutasi Tambah	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.619.914.583
- Hibah Peralatan dan Mesin berupa 1 (Satu) unit kendaraan Outlander PHEV yang Belum Dilakukan Pengesahan	1.311.700.000
- Hibah Peralatan dan Mesin berupa 1 (Satu) unit Mobil Ambulans Beserta Kelengkapannya	272.000.000
- Reklasifikasi dari KDP berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020	18.755.552.769
Jumlah Mutasi Tambah	29.959.167.352
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi dari KDP berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020 yang merupakan Aset Ekstrakomptabel	83.319.379
Jumlah Mutasi Kurang	83.319.379
Jumlah Mutasi	29.875.847.973
Saldo Akhir 31/12/2021	137.776.726.404
Akumulasi Penyusutan	(83.715.709.822)
Nilai Buku per 31/12/2021	54.061.016.582

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp468.773.597.003 dan Rp400.689.725.717. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan di Kementerian BUMN diakibatkan oleh adanya penambahan yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 serta reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pembangunan berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020.

Adapun Rincian kenaikan/ penurunan tersebut disajikan sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2020		400.689.725.717
Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi dari KDP berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020	50.693.484.577	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021	864.428.276	
- Transfer Masuk atas Aset Tetap Renovasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.028.750.698	
- Transfer Masuk atas Aset Tetap Renovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4.497.207.735	
Jumlah Mutasi Tambah		68.083.871.286
Mutasi Kurang		
-		
Jumlah Mutasi Kurang		
Jumlah Mutasi		68.083.871.286
Saldo Akhir 31/12/2021		468.773.597.003
Akumulasi Penyusutan		(35.944.615.706)
Nilai Buku per 31/12/2021		432.828.981.297

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 disajikan di Lampiran Laporan Keuangan ini.

Pada tahun 2021, terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang diakibatkan oleh 2 (dua) Transfer Masuk atas Aset Tetap Renovasi yaitu:

- Transfer Masuk atas Aset Tetap Renovasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp12.028.750.698 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor B/PL.02.06/1123/5.1/2021 dan Nomor BAST-03/KPB.MBU/11/2021 tanggal 16 November 2021.
- Transfer Masuk atas Aset Tetap Renovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebesar Rp4.497.207.735 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 02/BAST/KPB/PL.02.01/12/2021 dan Nomor BAST-05/KPB.MBU/12/2021 tanggal 13 Desember 2021.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berupa instalasi gardu listrik, jaringan air minum, dan jaringan telepon. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.706.388.680 dan Rp7.706.388.680. Tidak terdapat penambahan/ pengurangan pada pos Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.066.410.162 dan Rp1.066.410.162. Tidak terdapat penambahan/pengurangan pada pos Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp576.910.162, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp489.500.000.

13. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp68.862.035.362.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31/12/2020		68.862.035.362
Mutasi Tambah		676.951.984
- Penyelesaian Pekerjaan yang belum selesai 100% berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020	676.951.984	
Mutasi Kurang		69.538.987.346
- Penghapusan KDP berupa Tanah untuk Lahan Arsip Tahun 2020	89.950.000	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020	50.693.484.577	
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja dan Perbaikan MEP Gedung Kementerian BUMN Tahun 2020	18.755.552.769	
Jumlah Mutasi		(68.862.035.362)
Saldo Akhir 31/12/2021		0

14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(121.163.191.508) dan Rp(93.700.217.593). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	137.776.726.404	83.715.709.822	54.061.016.582
2	Gedung dan Bangunan	468.773.597.003	35.944.615.706	432.828.981.297
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.706.388.680	1.502.865.980	6.203.522.700
4	Aset Tetap Lainnya	1.066.410.162	0	1.066.410.162
	Jumlah	615.323.122.249	121.163.191.508	494.159.930.741

15. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi Kementerian BUMN merupakan tagihan ganti rugi kepada Sdr. DNZ atas kehilangan BMN berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi B 7344 EQ. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Kerugian Negara Nomor BA-01/TIM TGR/KBUMN/2011 tanggal 24 November 2011 menetapkan bahwa besarnya penggantian kerugian negara atas kendaraan dinas roda 4 (empat) di atas sebesar Rp70.000.000 dengan cara diangsur Rp291.667, per bulan selama 20 tahun terhitung mulai bulan November 2011.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tersebut di atas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp28.240.748 dan Rp28.240.748. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011 Tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian/Lembaga diungkapkan bahwa Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5 ‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar, sehingga perhitungan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah sebagai berikut:

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto):

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.240.748
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
5‰ x 28.240.748	(141.204)
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	28.099.544

16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp141.204 dan Rp141.204 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang TGR. Ringkasan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan sebagai berikut:

Kualitas	Jumlah Debitur	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	1	28.240.748	0,50%	141.204

17. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.389.526.163 dan Rp23.281.538.648. Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.389.526.163 mengalami penurunan sebesar Rp3.892.012.485 dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2020 yang dikarenakan adanya Aset Tak Berwujud yang dihentikan

penggunaannya sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Nomor BA-03/PHS/2021. Rincian penghentian Aset Tak Berwujud Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Aset Tak Berwujud	Kelompok	NUP	Nilai
1	Portal Publik	Software	8	480.892.500
2	Portal Aset	Software	19	2.237.746.985
3	Aplikasi Private Cloud (<i>Cytrix Sharefile KBUMN</i>)	Software	21	800.000.000
4	Assessment Jaringan dan Data Center (<i>Security Information Event Management</i>)	Software	24	140.283.000
5	SSL DigiCert	Lisensi	1.913	233.090.000
Jumlah				3.892.012.485

Aset Tak Berwujud pada Kementerian BUMN berupa Aplikasi (*software*) dan Lisensi. Penjelasan atas Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen ASN (*simanis*) <http://simanis.bumn.go.id> yang sebelumnya bernama *office automation* (OA) senilai Rp3.836.737.987 dibangun pada tahun 2008 dengan keseluruhan proses bisnis di Kementerian telah diakomodir dalam OA. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Sampai dengan tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh internal bidang Teknologi Informasi (TI). Kondisi OA saat ini masih digunakan dalam proses bisnis internal di Kementerian BUMN seperti modul Pengelolaan Kepegawaian (SDM), Cuti, Izin, Absensi, Tunjangan Kinerja Perjalanan Dinas, *Monitoring* Tagihan dan SPBy, Layanan Survei Internal, Pelaporan Pajak, Manajemen Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.
2. Portal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) <http://pkbl.bumn.go.id> senilai Rp1.411.974.599 dibangun pada tahun 2008, dan saat ini telah digunakan oleh Kementerian BUMN untuk pengumpulan data penyerapan dana PKBL dari BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif. Pada tahun 2017 dilakukan pengembangan oleh Internal Bidang TI dengan menyesuaikan data dan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Portal SDM Online (<http://sdm.bumn.go.id>) dibangun pada tahun 2008 senilai Rp1.427.335.424, dan telah digunakan oleh Kementerian BUMN sebagai informasi masa jabatan Direksi dan Komisaris serta *talent pool* kandidat Direksi dan Komisaris BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan *dashboard* eksekutif.
4. Portal SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) (<http://silaba.bumn.go.id>) senilai Rp2.065.030.155 dibangun pada tahun 2008 dengan nama *Executive Information System* (EIS) yang kemudian diubah menjadi Portal *Financial Information System* (FIS) pada tahun 2011 dan terakhir diubah menjadi

- SiLaba (Sistem Informasi Pelaporan Berkala) pada tahun 2018. Portal tersebut digunakan oleh BUMN melaporkan laporan Keuangan/manajemen secara berkala kepada Kementerian BUMN. Pada tahun 2010 dilaksanakan pengembangan portal tersebut melalui anggaran belanja pemeliharaan dan pada tahun 2011 diadakan pengembangan portal berupa pemeliharaan portal dan pengembangan dashboard eksekutif. SiLaba berdasarkan fungsinya sebagai media pelaporan keuangan seluruh BUMN terdiri dari Laporan *Audited*, RKAP, Triwulanan, Tahunan/Manajemen dan Rencana Jangka Panjang.
5. Lisensi Aplikasi Penunjang Pilot Sistem BI senilai Rp276.092.300 adalah aplikasi penunjang *Business Intelligence* (BI) untuk memberikan manfaat kepada pimpinan Kementerian BUMN untuk membantu pekerjaannya. Lisensi Aplikasi ini saat ini masih digunakan untuk sistem virtualisasi HyperV.
 6. Lisensi Windows Server 2012 R2 Data Center Edition senilai Rp367.591.912 Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 7. Lisensi Windows Server 2012 User Cal senilai Rp150.518.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 8. Lisensi Exchange Server 2013 Standard senilai Rp21.125.952 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 9. Lisensi Exchange Server 2013 Enterprise senilai Rp120.921.608 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 10. Lisensi Exchange Standard CAL 2013 OLP NL USERCAL senilai Rp140.864.700 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 11. Lisensi Exchange Standard CAL 2013 OLP woSrvcs senilai Rp88.252.500 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 12. Lisensi WinRghtsMgmtSrvcsCAL 2012 olp nl Gov UsrCAL senilai Rp124.995.000 merupakan Lisensi yang digunakan untuk optimalisasi sistem email Kementerian BUMN.
 13. Dashboard BUMN senilai Rp2.251.541.016 yang dibangun tahun 2015 merupakan aplikasi untuk menampilkan *dashboard monitoring* atas informasi strategis BUMN, berupa kantor pusat dan anak perusahaan BUMN, Direksi & Komisaris BUMN, proyek strategis BUMN, serta data finansial BUMN.
 14. Lisensi Anti Spam senilai Rp70.180.000 merupakan perangkat Email Security Gateway sebagai sarana infrastruktur di Kementerian BUMN, sebagai proteksi fasilitas email Kementerian BUMN dari permasalahan spam.
 15. Lisensi Sistem Backup senilai Rp152.848.707 untuk sistem *backup* penyimpanan data *server* dari *clustering server* ke *tape drive*.
 16. Lisensi VMware senilai Rp2.815.169.280 adalah suatu perangkat lunak *virtual machine* untuk menciptakan dan menyimulasikan server secara virtual. VMware berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi lainnya.

17. Lisensi Cisco 5508 Series senilai Rp320.386.220 merupakan perangkat WLAN *Controller* yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan sinyal *wifi* dan mengatur *access point* sesuai *coverage* areanya.
18. Antivirus Endpoint Protection senilai Rp26.048.611 adalah perangkat lunak yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan pada server dari serangan dan permasalahan virus.
19. Lisensi Migrasi IP Telephony senilai Rp728.238.435 adalah *upgrade* sistem IP Telephony dari versi yang sudah menggunakan versi terbaru, layanan IP Telephony untuk menunjang sistem telepon sentral di Kementerian BUMN.
20. Datacom Call Partner senilai Rp28.094.000 merupakan sistem *billing* yang terpasang pada *server* untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dari penggunaan IP Phone di Kementerian BUMN.
21. Microsoft SharePoint senilai Rp198.037.000 merupakan pembaruan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NDE) dengan *platform* SharePoint yang memerlukan penambahan perangkat lunak dalam mendukung implementasi tersebut. Perangkat lunak pendukung aplikasi NDE terdiri dari Microsoft SharePoint Server dan CAL yang merupakan *Software* untuk tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun.
22. Lisensi SSL Digicert senilai Rp35.345.998 merupakan lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di *website* melalui internet dengan teknologi enkripsi data yang canggih. SSL yang digunakan di Kementerian BUMN adalah SSL Digicert yang telah dilakukan perpanjangan selama 3 tahun pada tahun 2020. Pembelian SSL Digicert sifatnya pembaruan dalam jangka waktu tertentu.
23. Aplikasi Pendukung Infrastruktur IT senilai Rp1.546.589.000 merupakan aplikasi untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari perangkat apa pun secara aman dan sistem manajemen basis data relasional dengan menggunakan bahasa *query*.
24. Penambahan Agent for VMware and HyperV pada Aplikasi Sistem *backup* senilai Rp100.386.000 merupakan aplikasi untuk penambahan agen VMware dan Hyper-V pada aplikasi sistem *backup*.
25. Software Office senilai Rp744.150.000 merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai di lingkup Kementerian BUMN dalam menyelesaikan tugas.
26. Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Internal) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan November 2019 dan digunakan untuk pengelolaan program (tahunan) pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
27. Aplikasi Simaris (Sistem Informasi Manajemen Risiko) senilai Rp99.000.000, merupakan aplikasi yang di-*launch* pada bulan Desember 2019 dan digunakan untuk pengelolaan manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja Inspektorat.
28. Navicat PostgreSQL, Nitro PDF 12, Sectigo SSL DV Certificate, Sketch, UI8 Design Resources, Easus Data Recovery, Adobe CC All Aps, JetBrains PhpStorm senilai Rp28.711.060 merupakan aplikasi pendukung pengembangan TI di Kementerian BUMN yang diadakan pada tahun 2019.

29. Software Office 2019 senilai Rp114.360.000, merupakan *software* untuk mendukung aplikasi perkantoran dan digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam menyelesaikan tugas di lingkup Kementerian BUMN.

18. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.892.012.485 dan Rp50.942.645.557. Saldo pos Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Aset	Dasar	Nilai 31 Desember 2020	Penghentian Penggunaan	Penghapusan	Nilai 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-07/PHS/2019 tanggal 11 November 2019	128.326.000	0	128.326.000	0
2	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No BA-02/PHS/2019 tanggal 27 Maret 2019	23.107.500	0	23.107.500	0
3	Aset Tetap	Berita Acara No. BA-01/PHS/2020 tanggal 23 Desember 2020	50.791.212.057	0	50.791.212.057	0
4	Aset Tak Berwujud	Berita Acara No. BA-03/PHS/2021 tanggal 31 Desember 2021	0	3.892.012.485	0	3.892.012.485
Total			50.942.645.557	3.892.012.485	50.942.645.557	3.892.012.485

Aset Tetap yang dilakukan penghapusan di tahun 2021 sebesar Rp50.791.212.057 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kelompok Aset	Kuantitas	Jumlah
1	Alat Bantu	6	18.800.580.846
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	25.507.900
3	Alat Bengkel Bermesin	8	26.543.000
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	19	24.745.050
5	Alat Ukur	1	575.300
6	Alat Pengolahan	13	25.066.910
7	Alat Kantor	971	7.859.710.493
8	Alat Rumah Tangga	4.004	10.611.187.788
9	Alat Studio	19	783.423.700
10	Alat Komunikasi	132	192.383.520
11	Alat Kedokteran	38	38.321.250
12	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	50	303.863.450
13	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2	48.400.000
14	Peralatan laboratorium Hydrodinamica	19	704.992.800
15	Persenjataan Non Senjata Api	2	11.530.200
16	Komputer Unit	294	7.435.504.125
17	Peralatan Komputer	142	3.798.883.725
18	Alat Kerja Penerbangan	10	99.132.000
19	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	860.000

No	Kelompok Aset	Kuantitas	Jumlah
Jumlah			50.791.212.057

Aset Tak Berwujud yang dilakukan penghapusan di tahun 2021 sebesar Rp151.433.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset	Kelompok	Kuantitas	NUP Awal	NUP Akhir	Jumlah
1	Microsoft Project	Lisensi	3	1	3	17.257.500
2	Microsoft Visio	Lisensi	2	4	5	5.850.000
3	Sophos Endpoint Protection	Lisensi	380	1529	1908	128.326.000
Jumlah						151.433.500

19. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(19.848.854.395) dan Rp(67.646.810.616). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Aset 31 Desember 2021	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2021	Nilai Buku 31 Desember 2021
1	2	3	4	6
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	12.303.971.240	12.083.050.843	220.920.397
2	Lisensi	7.085.554.923	3.964.581.364	3.120.973.559
Jumlah		19.389.526.163	16.047.632.207	3.341.893.956
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	48.092.495	(48.092.495)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.892.012.485	3.753.129.693	138.882.792
Jumlah		3.892.012.485	3.801.222.188	90.790.297
Total		23.281.538.648	19.848.854.395	3.432.684.253

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2021	Akm. Penyusutan/ Amortisasi Tahun 2020	Kenaikan/(Penurun)
1	2	3	4	5
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	12.083.050.843	15.445.913.455	(3.362.862.612)
2	Lisensi	3.964.581.364	3.323.443.308	641.138.056
Jumlah		16.047.632.207	18.769.356.763	(2.721.724.556)
B	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	48.092.495	48.796.599.653	(48.748.507.158)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.753.129.693	80.854.200	3.672.275.493
Jumlah		3.801.222.188	48.877.453.853	(45.076.231.665)
Total		19.848.854.395	67.646.810.616	(47.797.956.221)

20. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp78.578.543 dan Rp2.468.333.417. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.389.754.874 dibandingkan Per 31 Desember 2020 karena terdapat mutasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rincian	Nilai Utang Per 31 Desember 2020	MUTASI		Nilai Utang Per 31 Desember 2021	Keterangan
				Tambah	Kurang		
1	Kekurangan pembayaran gaji ke 13 Tahun 2020	Belanja Pegawai	12.298.314	0	12.298.314	0	Koreksi kesalahan pencatatan nilai utang yang menyebabkan dua kali pengakuan utang atas kekurangan pembayaran gaji ke 13 tahun 2020
2	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2020*	Belanja Barang	2.150.094.226	0	2.150.094.226	0	Dilunasi melalui beberapa SP2D pada Lampiran Laporan Keuangan
3	Tunggakan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020*	Belanja Modal	211.505.844	0	211.505.844	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut - 210191302007921 - 210191302007255
4	Kekurangan pembayaran tunjangan jabatan Tahun 2020	Belanja Pegawai	67.028.778	0	67.028.778	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191301019380
5	Kekurangan pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2020	Belanja Pegawai	1.145.801	0	1.145.801	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191303012491
6	Kekurangan pembayaran gaji ke 13 Tahun 2020	Belanja Pegawai	13.027.814	0	13.027.814	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191301035270
7	Kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan pangkat Tahun 2020	Belanja Pegawai	4.425.340	0	4.425.340	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191301036385
8	Kekurangan pembayaran gaji pegawai tahun 2020	Belanja Pegawai	8.807.300	0	8.807.300	0	Terdapat koreksi pengurangan nilai utang sebesar Rp5.500.000 berdasarkan surat dari Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Nomor ND-494/S.MBU.A/07/2021 tanggal 9 Juli 2021. Kemudian sisa utang sebesar Rp3.307.300 telah dilakukan pelunasan dengan SP2D nomor 210191301047263
9	Kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan pangkat Tahun 2020	Belanja Pegawai	0	3.836.140	3.836.140	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191301035387
10	Kekurangan pembayaran gaji susulan	Belanja Pegawai	0	28.404.644	28.404.644	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191301034284
11	Pembayaran Biaya Pendidikan Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN Intake Tahun 2021	Belanja Barang	0	35.916.667	35.916.667	0	Sudah dilunasi dengan SP2D berikut 210191303015016
12	Kekurangan Pembayaran Gaji atas Kenaikan Pangkat tahun 2021 untuk 10 pegawai	Belanja Pegawai	0	6.515.579	0	6.515.579	Kekurangan Pembayaran Gaji atas Kenaikan Pangkat bulan April - Desember Tahun 2021
13	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2021	Belanja Pegawai	0	61.663.212	0	61.663.212	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Februari - Desember Tahun 2021
14	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan Tahun 2021	Belanja Pegawai	0	7.560.000	0	7.560.000	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan Bulan Juli - Desember Tahun 2021
15	Tunggakan Belanja Barang Tahun Anggaran 2021	Belanja Barang	0	2.839.752	0	2.839.752	Tagihan Air Minum dalam Kemasan yang belum dilakukan pembayaran
Total			2.468.333.417	146.735.994	2.536.490.868	78.578.543	

21. Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan merupakan kewajiban atas penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga yang belum mendapatkan persetujuan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga) dari KPPN.

Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.311.700.000 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal 31 Desember 2021 senilai

Rp1.311.700.000 berupa 1 (Satu) unit kendaraan *Outlander PHEV* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 041/MMKSI-BA/2021. Saat ini, hibah tersebut sedang dalam proses pengajuan Nomor Register Hibah kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengesahan hibah dimaksud

22. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban atas Penerimaan pembayaran sewa ruangan Kantor Kementerian BUMN yang telah dibayarkan oleh *tenant* untuk periode sewa yang akan datang. Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp7.999.258.136 dan Rp7.147.613.212. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.999.258.136 terdiri atas:

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Pembayaran Yang Telah Dilakukan <i>Tenant</i>	Pendapatan Sewa Yang Menjadi Hak	Pendapatan Diterima Dimuka
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (ATM)	140.846.000	63.380.700	77.465.300
2	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	257.695.000	100.214.722	157.480.278
3	PT BRI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	0	66.528.000
4	PT BRI (Persero), Tbk	5.653.110.000	2.543.899.500	3.109.210.500
5	PT Telekomunikasi Seluler	266.100.000	119.745.000	146.355.000
6	PT BNI (Persero), Tbk	3.830.856.000	1.064.126.667	2.766.729.333
7	PT BNI (Persero), Tbk (ATM)	66.528.000	62.092.800	4.435.200
9	PT Dhost Telekomunikasi Nusantara	268.045.000	107.218.000	160.827.000
10	PT Danareksa	156.855.000	67.970.500	88.884.500
11	Koperasi Prabunara (48)	2.291.824.500	1.413.291.775	878.532.725
12	Koperasi Prabunara (Basement Baru)	411.430.500	233.143.950	178.286.550
13	Koperasi Prabunara (Sport Center)	196.125.000	75.181.250	120.943.750
14	Koperasi Prabunara (48) Extnd.	548.055.000	304.475.000	243.580.000
	Jumlah	14.153.998.000	6.154.739.864	7.999.258.136

23. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.254.155.353 dan Rp1.961.869.742.868. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**1. Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.029.767.545 dan Rp4.095.990.478. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang diperoleh dari penyewaan ruangan Gedung Kantor Kementerian BUMN oleh para *tenant*, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan Pendapatan Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/(Turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	30.000.000	0	30.000.000	100,00
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.950.248.334	3.954.957.662	(4.709.328)	(0,12)
3	Pendapatan Jasa Lainnya	2.100	0	2.100	100,00
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	47.117.111	140.461.577	(93.344.466)	(66,46)
5	Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji	2.400.000	0	2.400.000	100,00
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	571.239	(571.239)	0,00
	Total	4.029.767.545	4.095.990.478	(66.222.933)	(1,62)

Keterangan:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp30.000.000 merupakan nilai dari penjualan hasil pemusnahan arsip.

2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.950.248.334 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa listrik dan air oleh <i>Tenant</i>	4.920.372.188
- Penyesuaian:	
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Awal)	7.147.613.212
- Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (Akhir)	(7.999.258.136)
- Mutasi Piutang Bukan Pajak dari Tagihan Sewa Ruangan	(118.478.930)
	<u>3.950.248.334</u>

3. Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp2.100 bukan merupakan setoran satker Kementerian BUMN dan akan dilakukan koreksi pada rekonsiliasi periode berikutnya.

4. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp47.117.111 terdiri atas:

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembelian *Notebook* atas nama CV Sumber Abadi sebesar Rp5.760.679;
- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi atas nama PT Wika Pracetak Gedung sebesar Rp20.985.511;

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan *computer supplies* atas nama CV Raka Kencana sebesar Rp3.778.187;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan langganan aplikasi *Integrated Talent Management System* (ITMS) atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., sebesar Rp74.250;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa housekeeping, keamanan, dan pengemudi atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp5.246.230;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan *security paper* atas nama Perum Percetakan Negara RI sebesar Rp3.499.800;
 - Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sewa mesin foto copy atas nama PT Delta Sinkron Lestari sebesar 2.279.200;
 - Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan *waterproofing* atap gedung atas nama PT Intra Maju Indonesia sebesar Rp725.300;
 - Pembayaran denda keterlambatan pembayaran listrik periode November 2021 an PT BRI sebesar Rp74.902;
 - Pembayaran denda keterlambatan pembayaran listrik periode November 2021 an PT Dhost Telekomunikasi Nusantara Rp33.293;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan *fire stop* atas nama PT Niaga Artha Chemcons sebesar Rp1.782.867;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan jasa pembenahan arsip termin kedua atas nama PT Permata Graha Nusantara sebesar Rp2.596.320;
 - Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan instalasi hydrant taman belakang atas nama PT Atrindo Prima Persada sebesar Rp280.572.
5. Penerimaan Kembali Porsekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp2.400.000 merupakan potongan pada SPM Gaji Induk.

2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp57.803.877.109 dan Rp57.684.364.855. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	24.678.895.468	24.436.296.746	242.598.722	0,99
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.672.665.832	1.399.266.506	273.399.326	19,54
3	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	31.485.992.213	31.915.123.158	(429.130.945)	(1,34)
	Jumlah Belanja Kotor	57.837.553.513	57.750.686.410	86.867.103	0,15
	Pengembalian Belanja Pegawai	(28.883.766)	(110.467.705)	81.583.939	(73,85)
	Jumlah	57.808.669.747	57.640.218.705	168.451.042	0,29
1	Pembayaran Kekurangan Beban Pegawai Tahun 2019	0	(65.881.340)	65.881.340	(100,00)
2	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	0	132.228.831	(132.228.831)	(100,00)
3	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	0	(61.139.225)	61.139.225	(100,00)
4	Pelunasan Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	0	42.512.468	(42.512.468)	(100,00)
5	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2020	(85.627.733)	(25.495.484)	(60.132.249)	235,85
6	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (511111)	0	21.920.900	(21.920.900)	(100,00)
7	Kelebihan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	(13.387.988)	0	(13.387.988)	(100,00)
8	Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	107.979.575	0	107.979.575	100,00
9	Pelunasan Kekurangan Pembayaran Beban Pegawai Tahun 2021	(32.240.784)	0	(32.240.784)	(100,00)
10	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran tunjangan jabatan Wakil Menteri tahun 2021	15.176.992	0	15.176.992	100,00
11	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran gaji susulan Deputy tahun 2021	3.307.300	0	3.307.300	100,00
	Total	57.803.877.109	57.684.364.855	119.512.254	0,21

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.053.627.628 dan Rp2.302.075.427. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Beban Barang Konsumsi	2.025.799.801	2.294.847.657	(269.047.856)	(11,72)
4	Beban Bahan Baku	0	735.350	(735.350)	(100,00)
5	Beban Persediaan Lainnya	27.827.827	6.492.420	21.335.407	328,62
	Total	2.053.627.628	2.302.075.427	(248.447.799)	(10,79)

4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp95.416.246.129 dan Rp70.751.947.107. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Beban Barang Operasional	14.497.742.078	10.754.360.002	3.743.382.076	34,81
2	Beban Barang Non Operasional	9.826.409.138	13.549.689.962	(3.723.280.824)	(27,48)
3	Beban Jasa	71.008.775.534	46.428.298.443	24.580.477.091	52,94
4	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	83.319.379	19.598.700	63.720.679	325,13
	Beban Barang dan Jasa Kotor	95.416.246.129	70.751.947.107	24.664.299.022	34,86

1) Beban Barang Operasional

Beban Barang Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.497.742.078 dan Rp10.754.360.002. Rincian Beban Barang Operasional pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Barang Operasional	15.615.939.411	10.991.610.687	4.624.328.724	42,07
	Jumlah	15.615.939.411	10.991.610.687	4.624.328.724	42,07
1	Pengembalian Beban Jasa Operasional	(4.388.750)	(30.642.336)	26.253.586	100,00
2	Penyesuaian atas Biaya License Tahunan yang menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran	(776.601.025)	(966.678.264)	190.077.239	(19,66)
3	Tunggakan Belanja Barang Operasional Tahun 2020	0	239.804.300	(239.804.300)	(100,00)
4	Tunggakan Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020	0	75.611.666	(75.611.666)	(100,00)
5	Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. M.I.	0	(4.331.250)	4.331.250	(100,00)
6	Penyesuaian atas Tagihan Belanja Barang dan Jasa yang menggunakan akun Peralatan dan Mesin	0	450.100.048	(450.100.048)	(100,00)
7	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (521111)	0	260.750	(260.750)	(100,00)
8	Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (521115)	0	30.381.586	(30.381.586)	(100,00)
9	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (521111)	0	(96.075)	96.075	(100,00)
10	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (521211)	0	(8.201.110)	8.201.110	(100,00)
11	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (522151)	0	(23.460.000)	23.460.000	(100,00)
12	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Operasional Tahun 2020	(239.804.300)	0	(239.804.300)	(100,00)
13	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid Tahun 2020	(75.611.666)	0	(75.611.666)	(100,00)
14	Pelunasan Pembayaran Gaji Pegawai Tahun 2021 a.n. C.B.T.	(3.307.300)	0	(3.307.300)	(100,00)
15	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran tunjangan jabatan Wakil Menteri tahun 2021	(15.176.992)	0	(15.176.992)	(100,00)
16	Koreksi Audited BPK Koreksi salah MAK atas pembayaran gaji susulan Deputi tahun 2021	(3.307.300)	0	(3.307.300)	(100,00)
	Total	14.497.742.078	10.754.360.002	3.743.382.076	34,81

2) Beban Barang Non Operasional

Beban Barang Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.826.409.138 dan Rp13.549.689.962. Rincian Beban Barang Non Operasional pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Barang Non Operasional	11.215.887.574	13.071.104.835	(1.855.217.261)	(14,19)
1	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Barang Non Operasional yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	48.764.650	(48.764.650)	(100,00)
2	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Tahun 2020	0	(8.699.626)	8.699.626	(100,00)
3	Tunggakan Belanja Bahan Tahun 2020	0	258.395.103	(258.395.103)	(100,00)
4	Tunggakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2020	0	180.125.000	(180.125.000)	(100,00)
5	Pelunasan Tunggakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2020	(180.125.000)	0	(180.125.000)	(100,00)
6	Pelunasan Tunggakan Belanja Bahan Tahun 2020	(258.395.103)	0	(258.395.103)	(100,00)
7	Penyesuaian atas Pembayaran Biaya Beasiswa Pegawai Kementerian BUMN yang Dibayar Dimuka	(163.500.000)	0	(163.500.000)	(100,00)
8	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Berupa Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN Intake Tahun 2021	35.916.667	0	35.916.667	100,00
9	Pelunasan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Berupa Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN Intake Tahun 2021	(35.916.667)	0	(35.916.667)	(100,00)
10	Penyesuaian Belanja Dibayar Dimuka Biaya Pendidikan S1 dan S2 Pegawai Kementerian BUMN	(332.458.333)	0	(332.458.333)	(100,00)
11	Koreksi Audited BPK Koreksi kurang catat prepaid biaya pendidikan penerima beasiswa tahun akademik 2021 sd 2022	(455.000.000)	0	(455.000.000)	(100,00)
	Total	9.826.409.138	13.549.689.962	(3.723.280.824)	(27,48)

3) Beban Jasa

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp71.008.775.534 dan Rp46.428.298.443. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Jasa	72.281.706.965	45.225.053.152	27.056.653.813	59,83
1	Pengembalian Beban Jasa	0	(7.975.000)	7.975.000	(100,00)
2	Tunggakan Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	798.862.000	(798.862.000)	(100,00)
3	Tunggakan Beban Langganan Listrik	0	27.936.414	(27.936.414)	(100,00)
4	Tunggakan Beban Langganan Air	0	9.288.920	(9.288.920)	(100,00)
5	Tunggakan Beban Jasa Konsultan	0	100.025.000	(100.025.000)	(100,00)
6	Tunggakan Beban Sewa	0	226.764.957	(226.764.957)	(100,00)

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
7	Tunggakan Beban Jasa Lainnya	0	48.343.000	(48.343.000)	(100,00)
8	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Listrik Tahun 2020	(27.936.414)	0	(27.936.414)	(100,00)
9	Pelunasan Tunggakan Beban Langganan Air Tahun 2020	(9.288.920)	0	(9.288.920)	(100,00)
10	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa Konsultan Tahun 2020	(100.025.000)	0	(100.025.000)	(100,00)
11	Pelunasan Tunggakan Beban Beban Sewa Tahun 2020	(226.764.957)	0	(226.764.957)	(100,00)
12	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa Lainnya Tahun 2020	(48.343.000)	0	(48.343.000)	(100,00)
13	Pelunasan Tunggakan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020	(798.862.000)	0	(798.862.000)	(100,00)
14	Koreksi Audited BPK Koreksi pemakaian langganan air tahun 2019 yang dibayar pada 2021	(61.711.140)	0	(61.711.140)	(100,00)
Total		71.008.775.534	46.428.298.443	24.580.477.091	52,94

4) Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

Beban Barang Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp83.319.379 dan Rp19.598.700. Rincian Beban Jasa pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Penyesuaian Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	83.319.379	19.598.700	63.720.679	325,13
Jumlah		83.319.379	19.598.700	63.720.679	325,13

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.248.897.218 dan Rp8.438.185.133. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2021		
1	Belanja Pemeliharaan	9.063.199.324	8.907.986.642	155.212.682	1,74
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	222.543.200	49.824.922	172.718.278	346,65
2	Koreksi pencatatan voucher BBM	8.800.000	(7.350.000)	16.150.000	(219,73)
3	Penyesuaian atas Belanja Pemeliharaan berupa Pelunasan Jasa Service dan Maintenance Mesin Tahun 2019	0	(32.560.000)	32.560.000	(100,00)
4	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	23.454.200	(23.454.200)	(100,00)
5	Tunggakan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020	0	5.478.000	(5.478.000)	(100,00)

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
6	Tunggakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020	0	51.205.000	(51.205.000)	(100,00)
7	Tunggakan Beban Pemeliharaan Lainnya	0	49.331.195	(49.331.195)	(100,00)
8	Koreksi Biaya Warranty	0	(91.499.999)	91.499.999	(100,00)
9	Penyesuaian atas pembebanan Belanja pengadaan air minum yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	(2.604.500)	2.604.500	(100,00)
10	Penyesuaian atas pembebanan Belanja Modal Aset Tak Berwujud yang menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	(35.345.998)	35.345.998	(100,00)
11	Koreksi Audited BPK Kesalahan Pencatatan Lisensi	0	(479.734.329)	479.734.329	(100,00)
12	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Lainnya Tahun 2020	(8.221.866)	0	(8.221.866)	(100,00)
13	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020	(5.478.000)	0	(5.478.000)	(100,00)
14	Pelunasan Tunggakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020	(51.205.000)	0	(51.205.000)	(100,00)
15	Beban Persediaan Suku Cadang	19.259.560	0	19.259.560	100,00
	Jumlah	9.248.897.218	8.438.185.133	810.712.085	9,61

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.970.296.074 dan Rp17.402.379.216. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
		31 Desember 2021	31 Desember 2020		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.413.875.818	16.773.325.756	(5.359.449.938)	(31,95)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	745.431.084	591.240.263	154.190.821	26,08
		12.159.306.902	17.364.566.019	(5.205.259.117)	(29,98)
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas	(81.430.828)	(87.356.803)	5.925.975	(6,78)
2	Penyesuaian atas pembebanan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang menggunakan akun Beban Persediaan	0	17.850.000	(17.850.000)	(100,00)
3	Tunggakan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2020	0	107.580.000	(107.580.000)	(100,00)
4	Koreksi Audited BPK Pengembalian Kelebihan Belanja TA 2020 di TA 2021 (524119)	0	(260.000)	260.000	(100,00)
5	Pelunasan Tunggakan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2020	(107.580.000)	0	(107.580.000)	(100,00)
	Jumlah	11.970.296.074	17.402.379.216	(5.432.083.142)	(31,21)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp28.597.849.849 dan Rp23.359.614.648. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2021	31 Desember 2020		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.847.720.076	12.480.082.480	5.367.637.596	43,01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.415.551.357	8.094.741.689	1.320.809.668	16,32
Beban Penyusutan Jaringan	255.080.784	171.648.705	83.432.079	48,61
Jumlah	27.518.352.217	20.746.472.874	6.771.879.343	32,64
Beban Amortisasi Software	296.059.873	341.861.680	(45.801.807)	(13,40)
Beban Amortisasi Lisensi	722.719.556	732.607.054	(9.887.498)	(1,35)
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	12.625.708	12.832.600	(206.892)	(1,61)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dlm Operasional Pemerintah	48.092.495	1.525.840.440	(1.477.747.945)	(96,82)
Jumlah	1.079.497.632	2.613.141.774	(1.533.644.142)	(58,69)
Total	28.597.849.849	23.359.614.648	5.238.235.201	22,42

8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp39.467.136 dan Rp(66.509.480). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.467.136 merupakan Beban Penyisihan Tak Tertagih dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Piutang Macet dan Piutang Jangka Panjang.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2021	31 Desember 2020		
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.030.000.000	0	1.030.000.000	100,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(2.107.049.209)	0	(2.107.049.209)	100,00
Jumlah Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(1.077.049.209)	0	(1.077.049.209)	100,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.458.399	17.265.240	193.159	1,12
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	84.431.435	44.654.182	39.777.253	89,08
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	3.676.000	(3.676.000)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	36.566.858	(36.566.858)	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(50.482.233)	50.482.233	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	(346.947.200)	346.947.200	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Gaji pegawai an. RNZ dkk	0	(28.020.454)	28.020.454	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja an. MW dkk	0	(17.265.240)	17.265.240	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus a.n. HRH dan Asy	0	(21.042.808)	21.042.808	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus an. AS dkk	0	(8.662.500)	8.662.500	(100,00)

LK Kementerian BUMN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan	% naik/ (turun)
	31 Desember 2021	31 Desember 2020		
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium PPNPN tahun 2019	0	(11.029.625)	11.029.625	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Honorarium Staf Khusus an. PN	0	(416.667)	416.667	(100,00)
Penyetoran atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Ruang Kantin VIP	0	(3.676.000)	3.676.000	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengakuan Beban Kerugian atas Persediaan Usang	0	(24.189.760)	24.189.760	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (425911)	0	21.920.900	(21.920.900)	(100,00)
Koreksi Audited BPK Pengembalian Belanja TA 2019 yang Diakui Sebagai Pengembalian Belanja TA 2020 (425912)	0	30.642.336	(30.642.336)	(100,00)
Pelunasan kelebihan pembayaran perjalanan dinas, konsinyering dan honor tim atas kegiatan 2020 yang dibayar di 2021 (Koreksi BPK 2020)	(32.017.185)	0	(32.017.185)	(100,00)
Pelunasan piutang kelebihan pembayaran iuran BPJS kesehatan an. PT Wika Realty	(30.113.250)	0	(30.113.250)	(100,00)
Pelunasan piutang kelebihan pembayaran honorarium staf khusus an. M.I.	(4.331.250)	0	(4.331.250)	(100,00)
Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja an. W.S.	(5.392.857)	0	(5.392.857)	(100,00)
Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Gaji Pokok an. M.N.	(5.958.900)	0	(5.958.900)	(100,00)
Pelunasan piutang kelebihan pembayaran Gaji Pokok an. P.S.H.	(1.775.000)	0	(1.775.000)	(100,00)
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	22.301.392	(357.006.971)	392.435.120	(109,92)
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(1.054.747.817)	(357.006.971)	(697.740.846)	195,44

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.869.742.868 dan Rp1.860.229.141.715.

2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(202.155.241.415) dan Rp(176.133.073.399). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp42.127.019 dan Rp493.278.682. Koreksi yang terjadi selama tahun 2021 yaitu koreksi kesalahan pengakuan nilai utang yang dicatat dua kali atas Kekurangan Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2020 a.n. I.A.R. dkk. untuk 14 Orang Pegawai senilai Rp12.298.314, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp7.285.807, serta Koreksi langganan air tahun 2019 yang dibayar pada 2021 senilai (61.711.140).

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp201.581.780.919 dan Rp277.280.395.870. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	190.942.482.059
Diterima dari Entitas Lain	(6.158.659.573)
Transfer Masuk	16.525.958.433
Pengesahan Hibah Langsung	272.000.000
Jumlah	201.581.780.919

5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.961.254.155.353 dan Rp1.961.869.742.868.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Data Tuntutan Hukum

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021 perihal : Kebijakan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkracht dan Pelaporan dan Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan/atau PC PEN, maka perlakuan pencatatan kewajiban atas putusan pengadilan yang inkracht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa uang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkracht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL.
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah inkracht hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat.
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau masih mungkin dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CALK LKKL.
- d. Pengalokasian anggaran dalam DIPA untuk pembayaran kewajiban yang berasal dari tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*in kracht van gewijsde*) menunjukkan tidak adanya upaya lain yang akan dilakukan pemerintah atas tuntutan hukum dimaksud sebagaimana Paragraf 10 huruf a PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Tuntutan hukum kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang telah inkracht adalah putusan hukum dengan Nomor Perkara 341PK/Pdt/2017 dengan pokok gugatan berupa tanah Persekutuan Masyarakat Adat Deli. Atas gugatan tersebut, hasil putusan kasasi menetapkan:

- 1) Tergugat I (PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara - Aceh);
- 2) Tergugat II (PT Kereta Api (Persero) Kantor Pusat di Bandung); dan
- 3) Tergugat III Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri BUMN.

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00. Nilai tersebut selanjutnya ditanggung renteng oleh ketiga pihak tergugat sehingga masing-masing tergugat memiliki kewajiban kepada penggugat sebesar Rp166.666.667,00.

Namun berdasarkan Putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn dinyatakan bahwa Permohonan Eksekusi aset PT KAI (Persero) di kawasan Pulo Brayan Kota Medan ditangguhkan karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, yaitu:

- 1) Perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas 40.000 m² (4 Ha) adalah milik Persekutuan Masyarakat Adat Deli (Sultan Deli).
- 2) Perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 menyatakan bahwa tanah di Pulo Brayan seluas kurang lebih 2.910 m² dan bangunan di atasnya seluasnya 180 m² adalah milik PT KAI (Persero).

Dengan kata lain tanah objek sengketa dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo 122/PDT/2016/PT.Mdn Jo 2433K/Pdt/2017 merupakan bagian tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2010/PN. Mdn Jo 433/Pdt/2011/PT. Mdn Jo 2113/Pdt/2013 Jo 341 PK/Pdt/2017.

PT KAI (Persero) belum melaksanakan hasil putusan yang telah inkraht sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya akan mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) sehubungan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 133/Pdt.G.2019/PN/Mdn. Sampai dengan saat ini, upaya hukum tersebut di atas sedang dalam tahap finalisasi identifikasi pihak-pihak Tergugat dalam objek perkara.

2. Struktur Organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian BUMN yang terdiri dari 2 (dua) Wakil Menteri, 1 (satu) Sekretaris Kementerian, 3 (tiga) Deputi, serta 3 (tiga) Staf Ahli. Dalam Peraturan Presiden tersebut, turut diatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing jabatan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pembinaan BUMN, dilakukan klusterisasi BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN I dan II sebagai berikut:

- a) Wakil Menteri BUMN I: dari 17 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN I, dikelompokkan ke dalam 6 kluster sektor industri;
- b) Wakil Menteri BUMN II: dari 70 BUMN binaan Wakil Menteri BUMN II, dikelompokkan ke dalam 6 kluster sektor jasa.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di

bidang badan usaha milik negara, Peraturan Menteri BUMN tersebut kemudian dicabut dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 29 Maret 2021.

3. Dampak Pandemi Covid-19

Presiden Republik Indonesia pada 31 Maret 2020 telah menetapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditegaskan kembali melalui KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang berakibat pada terjadinya perlambatan ekonomi global dan nasional. Mengingat bahwa bencana tersebut masih berlanjut pada tahun 2021, maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun kebijakan terkait dengan optimalisasi anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19 yaitu Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Keuangan meminta kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 Pagu Anggaran Tahun 2021. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian BUMN mengalami pemotongan sebesar Rp16,24 miliar atau sebesar 6,63% dari anggaran semula Rp244,82 miliar menjadi Rp228,59 miliar. Penghematan dilakukan terhadap kegiatan Kementerian BUMN antara lain perjalanan dinas, honor, pemeliharaan dan pendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya, Menteri Keuangan kembali meminta kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam surat berikut ini:

- Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja K/L TA 2021, Kementerian BUMN mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp4,78 miliar atau sebesar 2,09% dari pagu revisi pertama

- Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Kementerian BUMN mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp6,45 miliar atau sebesar 2,88% dari pagu revisi kedua
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV, Kementerian BUMN mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp24,31 miliar atau sebesar 11,18% dari pagu revisi ketiga.

Selain pemotongan, Kementerian BUMN merealokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penanganan penyebaran wabah Covid-19 sebesar Rp3.829.951.000 berupa anggaran antara lain dukungan alat perkantoran seperti disinfektan, masker, biaya karantina/isolasi mandiri, penggantian biaya *Swab PCR Test* yang mengacu kepada hasil *Rapid Antibodi/Rapid Antigen*, *tracing* kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif, atau hasil monitoring kesehatan pegawai.

Dari sisi perolehan pendapatan serta realisasi pencairan piutang di masa yang akan datang yang sebagian besar berasal dari *Tenant*, tidak terdapat risiko signifikan terhadap kontrak *existing* mengingat *Tenant* telah melakukan penysetoran sewa di awal periode sewa, sedangkan terdapat risiko yang cukup signifikan terhadap kontrak perpanjangan sewa atau kontrak baru mengingat sebagian *tenant* terdampak Covid-19. Disamping itu, sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait norma dan tarif penyisihan piutang. Kementerian BUMN akan tetap menjaga dan mengevaluasi seluruh kemungkinan yang berisiko terhadap operasional Kementerian BUMN sehingga seluruh target akan tetap tercapai di Tahun 2021.

4. Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Terdapat pengusulan penghapusan barang milik negara melalui penjualan sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan Nomor S-1/KPB.MBU/01/2021 dan S-4/KPB.MBU/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 atas barang milik negara yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.895.683.607 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor BA-01/PHS/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Selanjutnya, penjualan atas barang milik negara tersebut akan dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan hasil penjualan tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dan diakui sebagai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.

Berdasarkan Risalah Lelang Nomor: RL-387/29/2021 tanggal 12 Agustus 2021 telah dilaksanakan penjualan atas barang milik negara berupa 6.050 (enam ribu lima puluh) unit peralatan kantor/peralatan mesin rusak berat, 12 (dua belas) jenis item barang persediaan usang, 15 (lima belas) jenis item bongkaran bangunan Kondisi Rusak Berat dengan nilai penjualan sebesar Rp1.030.000.000.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, dilaksanakan penjualan atas barang milik negara secara lelang atas peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat sebanyak 21 unit. Dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, tidak ada yang melakukan penawaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor: 552/29/2021, sehingga akan dilaksanakan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penjualan atas barang milik negara secara lelang kepada Kepala KPKNL Jakarta V.

5. Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V atas nama Menteri Keuangan Nomor S-43/MK.6/WKN.07/KNL.05/2021 tanggal 21 April 2021 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang pada intinya Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang telah menyetujui penghapusan Barang Milik Negara berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Arsip senilai Rp89.950.000.

Atas hal tersebut, Menteri BUMN selaku Pengguna Barang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK-54/MBU/S/06/2021 tanggal 08 September 2021 hal Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud telah dihapus dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang Kementerian Badan Usaha Milik Negara.


MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ERICK THOHIR